



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An. KIC. KAP.  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Jakarta, Januari 2018

Pihak kedua,

Pihak Pertama

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
NIP. 195810171984031004

Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An. KIC. KAP.  
NIP. 196112031988021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>	
1.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan	1 Layanan
2.	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	1. Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan	1. 1 Layanan 2. 1 Layanan
3.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
4.	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	Pelayanan Kesehatan Haji	34.000 Jemaah Haji
2.	<b>PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</b>	<b>Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)</b>	
1.	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan JKN/KIS	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	1 Dokumen